



# Jaksa Tahan Iswanto

## PONTIANAK - Tersangka Kasus Bansos KONI Kalbar

kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial KONI Kalbar, Iswanto yang mantan Bendahara KONI resmi dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Pontianak menyusul dinyatakan lengkap berkas perkaranya. Ia pun resmi ditahan di Rutan Klas IIA Pontianak



Iswanto didampingi dua penasehat hukumnya, Joko Wiliono dan Mudzakir Dolman tiba di Kejaksaan Negeri Pontianak sekitar pukul 11.00. Sesampainya di Kejari Pontianak, Iswanto yang diserahkan Polda Kalbar berikut barang buktinya langsung diperiksa di ruang Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Pontianak. Iswanto diperiksa secara tertutup di ruangan itu.

Setelah hampir satu jam, Iswanto yang didampingi pengacaranya kembali dibawa menggunakan mobil tahanan Kejaksaan Negeri Pontianak ke Rutan Kelas IIA Pontianak untuk proses penahanan. Joko Wiliono mengatakan, dalam kasus yang menimpakliennya itu pihaknya menduga uang atau dana yang digunakan oleh kliennya hanya sebesar Rp650 juta. "Akan kami kembalikan uang itu. Pinjaman saja," katanya didampingi Mudzakir Dolman saat ditemui di

Kejari Pontianak. Dilauncikan Joko, dalam kasus ini, kliennya disangka melanggar pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 3 jo. Pasal 8 jo. Pasal 9 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU no. 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. "Inikan klien kami disangka dengan pasal 55, yakni ikut serta, artinya masih ada tersangka utamanya. Itu yang masih kita

◆ Ke Halaman 7 Kolom 5



## Jaksa Tahan Iswanto

*Sambungan dari halaman 1*

permasalahkan," katanya. Menurut Joko, dari total dana yang ada, yakni pada 2004-2008, kliennya mengaku menggunakan uang sebesar Rp650 juta. Sisanya, kata Joko, hasil dari penyidikan. Hanya saja, ada dana yang dapat dipertanggungjawabkan tapi tidak dibukukan atau hanya kelalaiannya saja. "Insya Allah akan kami kembalikan, karena dia (Iswanto) sudah memberikan keterangan dan itu akan dikembalikan," katanya.

Ditambahkan Joko, pihaknya juga akan mengupayakan penangan terhadap kliennya, setelah dinyatakan ditahan oleh Kejaksaan Negeri Pontianak. "Ini tahap dua. Hari ini juga akan dilakukan penahanan. Padahal waktu ditetapkan sebagai tersangka di Polda Kalbar tidak tahan. Nanti kami upayakan apakah nanti akan ditanggihkan atau pengalihan tahanan," tambahnya.

Ditemui secara terpisah, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Jasman Panjaitan mengatakan akan mengusut tuntas kasus dugaan korupsi dana Bansos KONI Kalbar yang diduga turut melibatkan mantan Gubernur Kalbar Usman Jafar dan anggota DPR Zulfadhli itu.

Menurutnya, Kasus korupsi Bansos pertama kali disidik oleh Polda Kalbar. Sekarang sudah diserahkan ke kejak-

saan. Penyerahan tahap dua ini dilaksanakan Kejari, sebagai lembaga penuntutan.

Namun demikian jika dalam persidangan nanti ada perkembangan-perkembangan baru, maka pihak akan segera mengambil alih untuk dilakukan penyidikan selanjutnya. "Jika nanti dalam persidangan ternyata ada hal-hal yang baru mengenai kasus ini, bisa saja langsung diambil alih kejaksaan," katanya.

Pihaknya masih memerlukan hasil audit dalam menetapkan tersangka. "Kami masih perlu audit BPK karena itu untuk mengetahui berapa kerugian negara," kata Jasman. Dugaan korupsi Bansos KONI Kalbar berdasarkan hasil temuan audit BPK. Kerugian negara senilai Rp22,14 miliar itu total dari APBD tahun 2006 hingga 2008. Hasil telaah itu mencakup penggunaan keuangan daerah oleh DPRD Kalbar periode 2004-2009 terindikasi kerugian daerah Rp10,07 miliar.

Kedua, pengeluaran keuangan KONI Kalbar oleh Wakil Bendahara KONI kepada satgas pra PON sebesar Rp1,368 miliar. Ketiga, pengeluaran keuangan KONI Kalbar oleh Wakil Bendahara KONI kepada satgas pelatda PONXVII sebesar Rp8,59 miliar.

Terakhir, ketekoran kas KONI Kalbar tahun 2009 yang terindikasi kerugian daerah sebesar Rp2,114 miliar. Khusus kasus

pengeluaran keuangan KONI Kalbar oleh Wakil Bendahara KONI kepada satgas pra PON sebesar Rp1,368 miliar ditangani Poltabes Pontianak. Beberapa kali melakukan pemeriksaan. Hingga akhirnya kasus tersebut diambil alih Polda Kalbar. Namun belum satu pun tersangka ditetapkan karena masih menunggu hasil audit BPK.

Tetapi BPK Pusat menyerahkan hasil audit ke KPK. Maka kasusnya berlanjut di KPK. Namun sejauhmana perkembangannya belum diketahui secara pasti. Justru mengalir kabar kasus tersebut bakal kembali ditangani Polda Kalbar, tapi menunggu pelimpahan secara resmi. Di lain pihak, Ketua Komisi A DPRD Kalbar Retno Pramudya mengkritik kinerja aparat hukum di Kalbar yang cukup lamban dalam menangani kasus Bansos KONI Kalbar tersebut. Kasus ini terkesan dipingpongkan hingga jeratannya hanya kepada bawahan. "Inilah wajah hukum kita. Sementara pejabat tingginya belum lagi diproses," katanya di Pontianak, Selasa (2/4) di Pontianak.

Menurutnya, kasus besar ini sudah lama. Namun belum juga tuntas. "Kasus bocornya anggaran Bansos merupakan hasil temuan audit BPK Kalbar 2006-2008 dan telah diserahkan kepada Polda Kalbar. Proses penyidikan dan penyelidikan-nya memakan waktu sekitar tiga tahun," ujarnya. (den/arf)